

Pemerintah harus jelaskan program listrik

35.000 MW tidak gagal

Senin, 11 Februari 2019 09:48 WIB



Ilustrasi: PLTU Lontar Unit 4 Maket PLTU Lontar dipajang dengan latar belakang pembangunan proyek PLTU Lontar unit 4 di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten. PLTU Lontar unit 1 - 4 dengan total kapasitas 4 x 315 MW tersebut siap mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik 35.000 MW (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sah-sah saja pemerintah ubah target

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah harus bisa menjelaskan program 35.000 MW yang sejak awal digadang-gadang oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) tidak gagal, meski belum terealisasi penuh hingga saat ini.

"Harusnya pemerintah jelaskan program 35 ribu MW bukan gagal, tapi memang harus disesuaikan karena ada perubahan kondisi," kata Fabby di Jakarta, Senin.

Menurut dia, program pembangunan pembangkit dengan total 35.000 MW hingga 2019 tadinya memang direncanakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tujuh persen dan pertumbuhan listrik di atas 8,5 persen per tahun.

Namun, pada kenyataannya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai rata-rata lima persen dan pertumbuhan listriknya hanya tumbuh kurang

dari lima persen.

"Memang asumsi-asumsi 35.000 MW tidak valid dan kita sebenarnya tidak butuh tambahan kapasitas 35.000 MW pada 2019," katanya.

Fabby menuturkan sejak 2017 lalu pemerintah dan PT PLN sudah menjadwalkan ulang pembangunan pembangkit dari yang seharusnya selesai pada 2019 menjadi 2023-2024.

Ia merinci sekitar 2.000 MW telah beroperasi saat ini karena merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang masa konstruksinya kurang dari setahun. Sebanyak 15.000 MW tengah dalam konstruksi, sisa 14.000 MW lainnya ditunda hingga 2021 dan sekitar 2.000 MW sisanya belum dimulai/direncanakan.

"Jadi memang begitu kondisinya dan memang perlu di-*review* dan sudah dilakukan. Sah-sah saja pemerintah ubah target," katanya.

Kondisi program 35.000 MW tersebut ditengarai akan jadi salah satu hal yang dibahas dalam Debat Capres kedua 17 Februari mendatang.

Program 35.000 MW listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.

Program 35.000 MW dan energi terbarukan diperkirakan bakal menjadi salah satu isu yang bakal dibahas dalam debat kedua calon presiden yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Februari mendatang.

Dalam debat kedua yang rencananya akan menggunakan tujuh panelis itu, sejumlah tema yang akan dibahas adalah mengenai energi, infrastruktur, pangan, sumber daya alam, serta tentang lingkungan hidup.

Baca juga: [Pemerintah siapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis tahun ini](#)

Pewarta: Ade Irma Junida

Editor: Risbiani Fardaniah